

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Arif S, 1986, *Hukum Perburuhan Indonesia (Himpunan Peraturan Perundang-undangan)*, Tinta Mas, Surabaya.
- Daulima Iskandar, 2010, *Makalah Hukum Acara Perdata*, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Darmanto Priyo, 2007, *Kamus Prima Bahasa Indonesia*, Penerbit Arkola, Surabaya.
- Djumiadi FX dan Soedjono Wiwoho, 1987, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Harjono Dhaniswara K, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha, Djambatan*, Jakarta.
- Harianto Aries, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Husni Lalu, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja di Indonesia (Telaah Terhadap Hukum Positif di Bidang Ketenagakerjaan)*, Universitas Mataram, Mataram.
- Karim Abdul, 2005, *Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kelsen Hans, 2015, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.
- Khakim Abdul, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2015, *Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

- Mertokusumo Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Rawls John, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sarnawa Bagus, 2006, *Hukum Ketenagakerjaan*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sendjun Manulang, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sembiring Jimmy Joses, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, PT. Visimedia Pustaka, Jakarta.
- Subekti R, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- _____, 1978, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Syamsuddin Syaafi, 2010, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta.
- _____, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Situmorang Basani, 2010, *Laporan Pengkajian Hukum Ketenagakerjaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Soepomo Imam, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 1988, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Surayin, 2004, *Tanya Jawab Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Yrama Widya, Bandung.

Majalah

- Dhoni Yusra, 2006, *Lex Jurnalica Vol.3 No. 2*, Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI).

HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Peraturan Menteri Ketenakerjaan Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014

Putusan PTUN Jakarta Perkara nomor 269/G/2015/PTUN-JKT.

Putusan PT TUN Jakarta Perkara nomor 195/B/2016/PT.TUN-JKT.

Putusan Mahkamah Agung Perkara nomor 110K/TUN/2017.

Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Nomor : 23/PPK-NKJ/IX/2014, tanggal 26 September 2014

Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 81

Keterangan Ahli

Keterangan Ahli Prof. Pajaman Simandjatak sebagai Ahli Penggugat dalam perkara 154/G/2019/PTUN.JKT pada tanggal 13 November 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Keterangan Ahli Emi Linting sebagai Ahli Tergugat dalam perkara 161/G/2019/PTUN.JKT pada tanggal 4 Desember 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Keterangan sebagai Ahli Yahya M Harahap sebagai Ahli Tergugat dalam perkara 75/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada tanggal 17 April 2019.

